BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

2022

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Amanat Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa Badan Publik, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), wajib menyediakan informasi publik yang dikuasainya dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

Tidak hanya menyediakan informasi publik, sebagai Badan Publik, BPOM juga melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus mencapai pelayanan informasi publik yang prima. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tersebut, BPOM telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM.

BPOM terus melakukan berbagai pembenahan, salah satunya melakukan penyempurnaan terhadap Tata Cara/Standar Pelayanan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Peraturan ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, BPOM juga melakukan pembenahan internal untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) internal keterbukaan informasi pubik di lingkungan BPOM pada tahun 2023. Untuk mengidentifikasi kesiapan PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan monev internal tersebut, telah dilaksanakan pemetaan awal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM pada tahun 2022.

Berbagai upaya tersebut membawa BPOM kembali memperoleh predikat Badan Publik “Informatif” pada tahun 2022 sebagai peringkat ke-4 kategori Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 98,88 berdasarkan hasil monev keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat.

Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi BPOM Tahun 2022 ini menyampaikan informasi terkait upaya-upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM selama tahun 2022. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan BPOM.

Jakarta, 28 Maret 2023
PPID BPOM

Reghi Perdana, SH., LLM.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik adalah sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Karena itu, BPOM terus berupaya menggelorakan semangat keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan dan menggalang peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Bagi BPOM, keterbukaan informasi sangat mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM serta perkembangan regulasi di bidang keterbukaan informasi publik, BPOM melakukan penyempurnaan terhadap Tata Cara/Standar Pelayanan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Selain itu, BPOM juga telah menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, sebagai upaya peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Pada tahun 2022, secara keseluruhan, PPID BPOM telah menerima 118 permintaan informasi publik, namun 4 diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap. 87 (76%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya; 16 (14%) permintaan informasi dikabulkan sebagian; dan 11 (10%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan, informasi yang tidak dikuasai (dikuasai oleh instansi lain), dan belum didokumentasikan.

PPID BPOM terus melakukan berbagai upaya pelaksanaan dan penguatan keterbukaan informasi publik, antara lain penguatan regulasi, penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan pelayanan informasi publik, penguatan publikasi informasi publik melalui berbagai media, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai bukti komitmen dalam implementasi keterbukaan informasi publik, BPOM kembali berhasil meraih Anugerah Badan Publik “Informatif” berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022. BPOM berhasil meraih peringkat ke-4 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 98,88, meningkat dari tahun 2021 yang memperoleh nilai 95,43.

Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR LAMPIRAN.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM.....	7
A. Tugas dan Fungsi.....	8
B. Struktur Organisasi PPID BPOM.....	9
C. Visi dan Misi.....	10
D. Maklumat Layanan	10
BAB II LAYANAN GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPOM.....	11
A. Sarana Layanan.....	11
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	16
C. Anggaran.....	17
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	18
A. Layanan Informasi Publik PPID BPOM.....	18
B. Layanan Informasi Publik PPID Utama BPOM.....	20
C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM.....	22
D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik.....	24
BAB IV KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2022.....	29
A. Kegiatan PPID BPOM.....	29
B. Capaian PPID BPOM.....	34
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	36
A. Kendala Eksternal.....	36
B. Kendala Internal.....	36
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	37

Daftar Lampiran

		Hal
Lampiran 1	DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2022……	39
Lampiran 2	RINGKASAN LAPORAN LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PPID BPOM TAHUN 2022……..	45
Lampiran 3	RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA BPOM TAHUN 2022……	46
Lampiran 4	RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKSANA BPOM TAHUN 2022…..……	47

Daftar Gambar

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID BPOM……..	9
Gambar 1.2	Maklumat Pelayanan…….	10
Gambar 2.1	Media Pelayanan Informasi Publik…….	11
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Layanan PPID Utama BPOM……..	11
Gambar 2.3	Ruang Layanan Informasi Publik PPID Utama BPOM……..	12
Gambar 2.4	Sarana Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik…….	13
Gambar 2.5	Penyediaan Sarana Bahan dan Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunanetra……..	14
Gambar 2.6	Layanan Informasi Publik melalui *Subsite* PPID BPOM dilengkapi dengan Fitur Layanan Disabilitas Sensorik……..	15
Gambar 2.7	Layanan Informasi Publik melalui PPID BPOM *Mobile*……..	16
Gambar 3.1	*Subsite* Unit Pelaksana Teknis BPOM……..	28
Gambar 3.2	Contoh Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial Unit Pelaksana Teknis BPOM…….	28

Daftar Grafik

		Hal
Grafik 2.1	SDM PPID Utama BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan…….	16
Grafik 3.1	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID BPOM Tahun 2022…….	18
Grafik 3.2	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Utama BPOM Tahun 2022…….	20
Grafik 3.3	Tujuan Permohonan Informasi Publik ke PPID Utama Tahun 2022	21
Grafik 3.4	Profil Pemenuhan SLA Layanan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2022…….	22
Grafik 3.5	Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT BPOM Tahun 2022……..	23
Grafik 3.6	Profil Pemenuhan SLA Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT BPOM Tahun 2022……..	24

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi sejak tahun 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP beserta peraturan turunannya mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keterbukaan informasi publik sangat penting, karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, Badan Publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga dapat membantu memberikan pilihan langkah bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Bagi BPOM, keterbukaan informasi memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Selain itu, keterbukaan informasi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan. Melalui keterbukaan informasi, kinerja pengawasan Obat dan Makanan dapat dipantau oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan *good and clean governance* (pemerintahan yang baik dan bersih) di lingkungan BPOM.

Bagi pelaku usaha, keterbukaan informasi memudahkan pelaku usaha dalam mengakses regulasi/kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu serta berdaya saing.

Bagi masyarakat, keterbukaan informasi publik memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang informatif dan cerdas yang mampu memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman serta dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Transparansi informasi pemerintah dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, setiap Badan Publik, termasuk BPOM menunjuk PPID serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Pada tahun 2011, upaya BPOM untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dimulai dengan membentuk PPID melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011. Seiring dengan perkembangan hukum, keputusan tersebut telah digantikan dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

PPID merupakan salah satu garda terdepan di lingkungan BPOM dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi tentang pengawasan Obat dan Makanan. Secara umum, PPID BPOM bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta melakukan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Tantangan pengelolaan informasi publik semakin besar di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi. Karena itu, badan publik harus bersama-sama menjaga agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif. Selain itu, badan publik juga harus meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, dan mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID BPOM bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi Pusat;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPOM;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
12. Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

B. Struktur Organisasi PPID BPOM

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM, PPID BPOM terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID Utama;
5. PPID Pelaksana Unit Kerja; dan
6. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.

Yang digambarkan ke dalam struktur organisasi sebagai berikut:

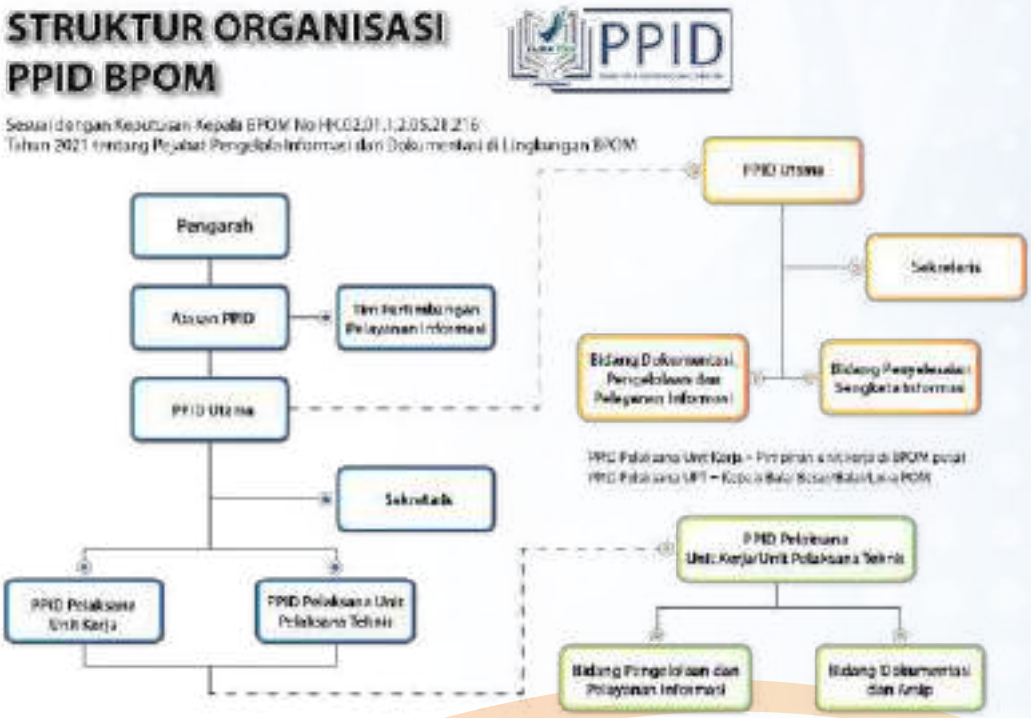

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID BPOM

C. Visi dan Misi

VISI

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

D. Maklumat Layanan

"Dengan ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM menyatakan:

Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan PPID BPOM

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPOM

A. Sarana Layanan

Ketersediaan sarana komunikasi merupakan salah satu faktor yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik di BPOM. Berbagai inovasi media layanan informasi diciptakan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2022 belum berakhir, sehingga layanan PPID dilakukan secara *online* dan *offline* (layanan datang langsung).

Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID BPOM. Media layanan PPID BPOM baik secara elektronik maupun non elektronik yaitu:

Gambar 2.1 Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM

Gambar 2.2 Ruang Tunggu Layanan PPID Utama BPOM

Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Utama BPOM

Area Parkir Khusus Difabel

Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda

Toilet Khusus Difabel

Kursi Roda dan Petugas Khusus yang Membantu

Loket dan Petugas Layanan Berkebutuhan Khusus di PPID Pelaksana BBPOM di Denpasar

Kursi Ruang Tunggu Kelompok Rentan di PPID Pelaksana BBPOM di Denpasar

Gambar 2.4 Sarana Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik

Leaflet dan Booklet Huruf Braille

Buku Standar Pelayanan Publik dengan Huruf Braille di PPID Pelaksana BBPOM di Denpasar

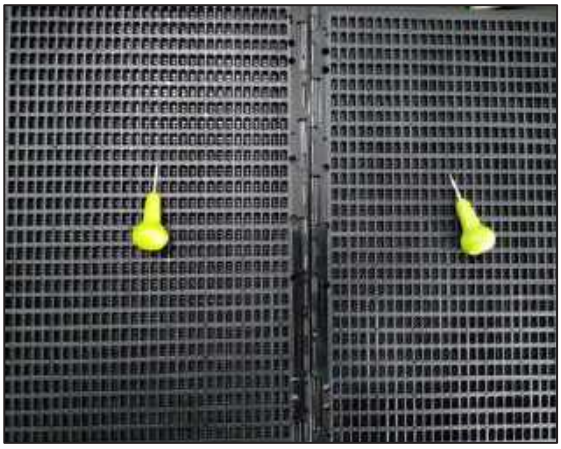

Reglet dan Stylus untuk Komunikasi di PPID Pelaksana Balai POM di Bengkulu

Gambar 2.5 Penyediaan Sarana Bahan Bacaan dan Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunanetra

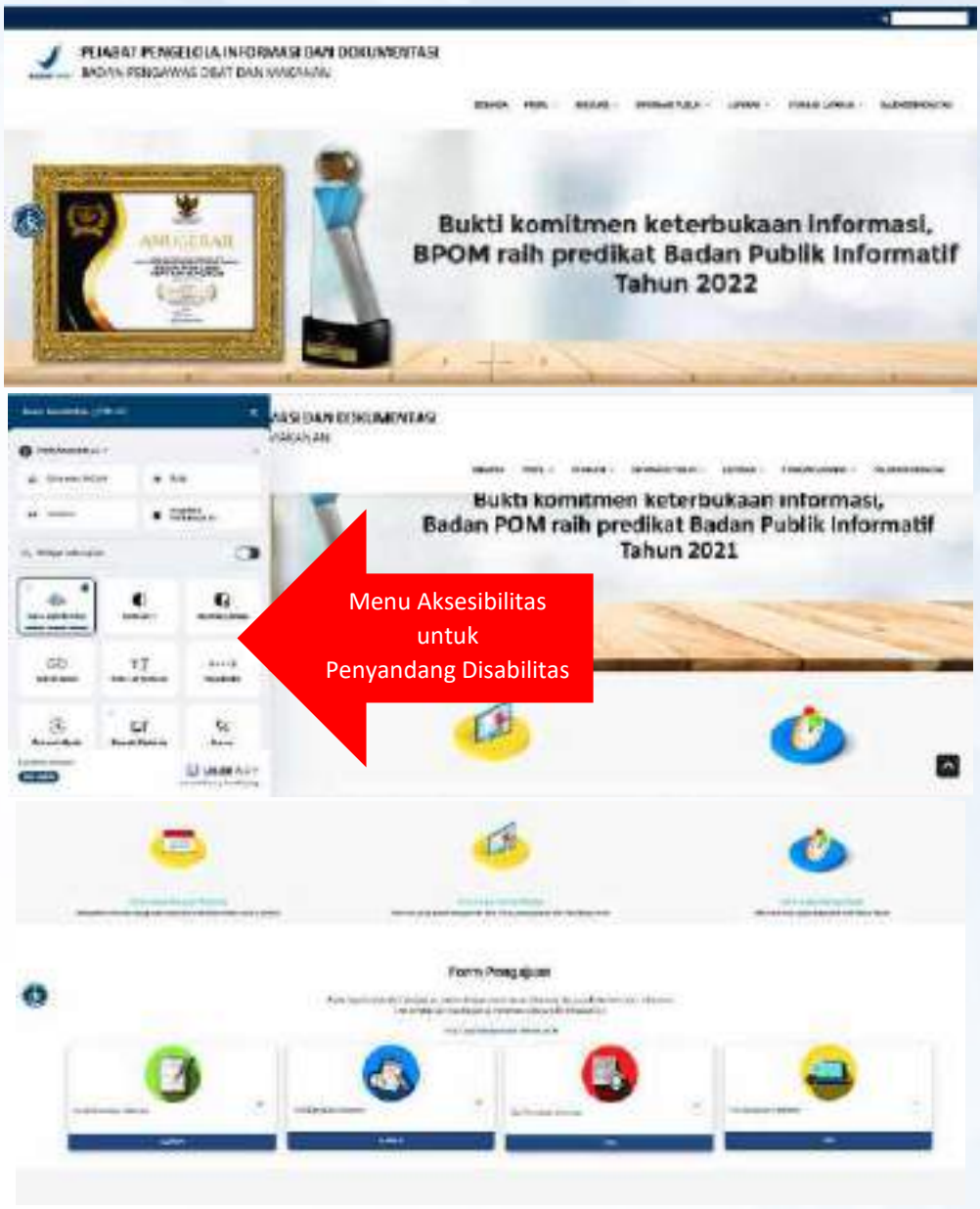

Gambar 2.6 Layanan Informasi Publik melalui *Subsite* PPID BPOM dilengkapi dengan Fitur Layanan Disabilitas Sensorik

Gambar 2.7 Layanan Informasi Publik melalui PPID BPOM *Mobile*

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID Utama BPOM didukung oleh SDM sebanyak 30 orang berasal dari Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (53,33%), Apoteker (20%), dan Magister (26,67%).

Grafik 2.1 SDM PPID Utama BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PPID di lingkungan BPOM didukung juga oleh SDM yang ada di 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan 73 PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia.

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, sehingga menuntut BPOM untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini. Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai peningkatan kompetensi, baik yang diselenggarakan internal BPOM, maupun yang diselenggarakan badan publik lain. Adapun daftar peningkatan kompetensi SDM PPID BPOM pada tahun 2022 sebagaimana Lampiran 1.

C. Anggaran

Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola PPID Utama BPOM pada tahun 2022 sebesar Rp7.608.379.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik	1.439.613.000
2	*Up grading* Sarana Prasarana IT – Pengembangan Website	573.500.000
3	Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	
	a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan	2.400.808.000
	b. Publikasi (Koordinasi Lintas Sektor Kehumasan dan Publikasi di Berbagai Media)	3.194.458.000
	Total Jumlah	**7.608.379.000**

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Publik PPID BPOM

Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, secara keseluruhan, PPID BPOM telah menerima 118 (seratus delapan belas) permintaan informasi publik, namun 4 diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap. 87 (76%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya; 16 (14%) permintaan informasi dikabulkan sebagian; dan 11 (10%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan, informasi yang tidak dikuasai (dikuasai oleh instansi lain), dan belum didokumentasikan.

Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID BPOM Tahun 2022

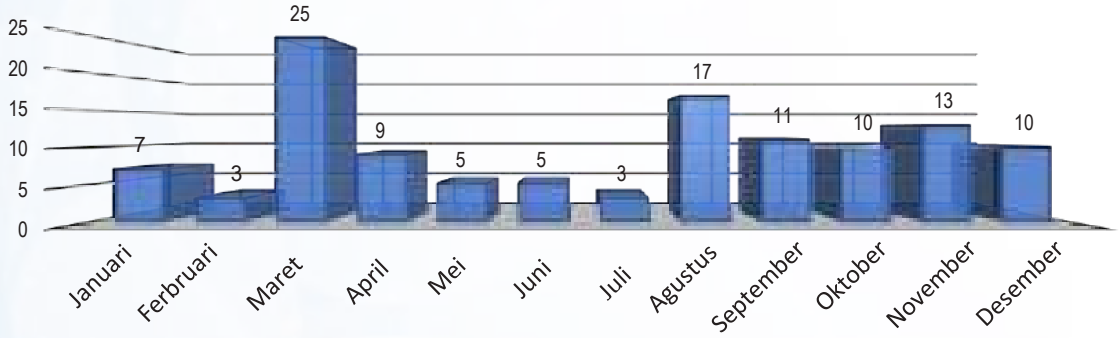

Alasan Permintaan Dikabulkan Sebagian/Ditolak

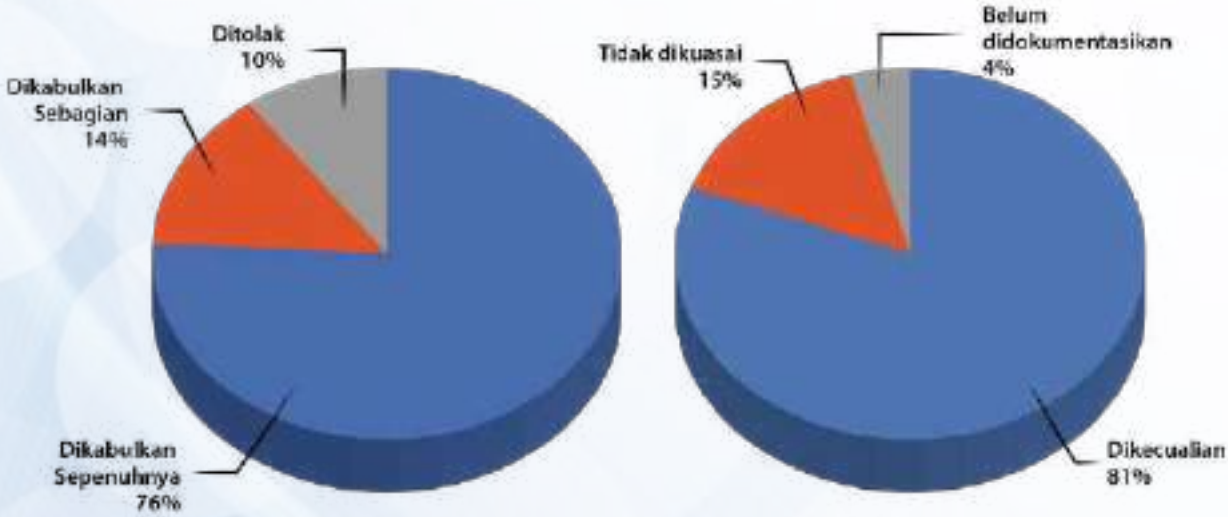

Grafik 3.1 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID BPOM Tahun 2022

Rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi yaitu 7,5 hari kerja. Sebanyak 86 (75%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 hari kerja, 28 (25%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 11-17 hari kerja, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan selama lebih dari 17 hari kerja. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik (di bawah 17 hari kerja) mencapai 100%. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID BPOM tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

Jumlah Penanganan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah Keberatan yang Diterima

Selama tahun 2022 PPID BPOM menerima 14 (empat belas) pengajuan keberatan informasi publik yang seluruhnya telah diberikan tanggapan oleh Atasan PPID.

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2022, PPID BPOM menerima 4 (empat) panggilan sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat, yaitu:

1. Register Nomor 039/V/KIP-PS/022 terkait tidak disediakan dan tidak diumumkannya informasi wajib berkala tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
2. Register Nomor 033/V/KIP-PS/022 terkait tidak disediakan dan tidak diumumkannya informasi wajib berkala tentang ringkasan program dan kegiatan di lingkup BPOM sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
3. Register Nomor 042/V/KIP-PS/022 terkait tidak disediakan dan tidak diumumkannya informasi wajib berkala tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
4. Register Nomor 058/V/KIP-PS/022 terkait tidak disediakan dan tidak diumumkannya informasi wajib berkala tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Pada sidang pertama dan kedua untuk empat register yang dilaksanakan pada tanggal 5, 6, 18, dan 21 Desember 2022 ini, pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Komisioner (MK), maka diputuskan bahwa MK menggugurkan register sengketa tersebut.

B. Layanan Informasi Publik PPID Utama BPOM

Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, PPID Utama BPOM telah menerima 59 (lima puluh sembilan) permintaan informasi dari pemohon dengan profesi pelaku usaha (25%), karyawan (22%), lainnya (22%), pelajar/mahasiswa (15%), sarjana hukum (7%), ibu rumah tangga 5%), apoteker (2%), dan LSM (2%). Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Utama BPOM tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Utama BPOM Tahun 2022

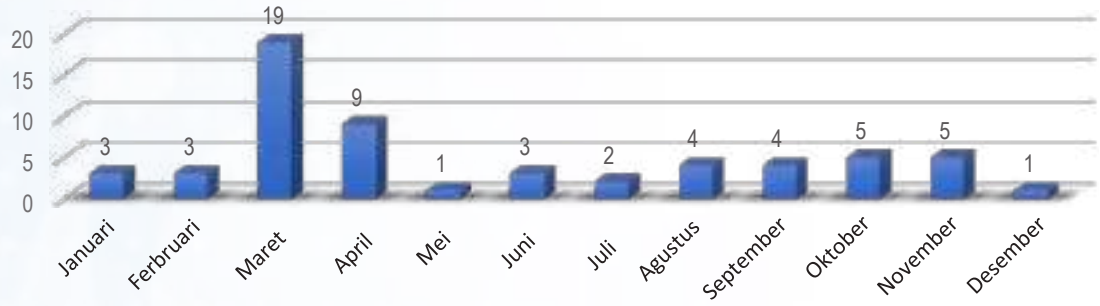

Jumlah Pemohon Informasi Publik PPID BPOM Tahun 2022

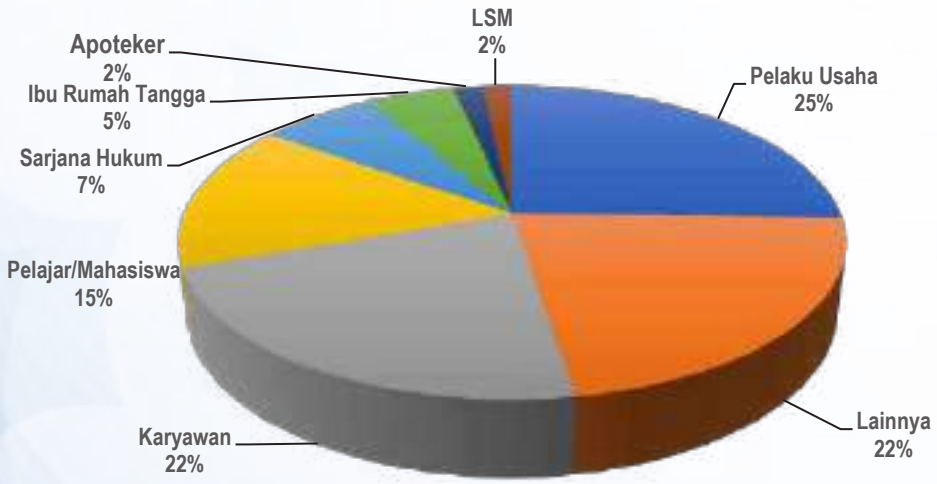

Grafik 3.2 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Utama BPOM Tahun 2022

Data yang diminta antara lain:

- Uji klinik dan efek samping Vaksin COVID-19
- Keamanan dan efektivitas Vaksin COVID-19
- *Emergency Use Authorization* (EUA) Vaksin COVID-19
- Sertifikat izin edar/surat keterangan terdaftar obat tradisional
- Profil dan biodata pimpinan dan ASN BPOM

- Peraturan tentang kategorisasi produk pangan olahan
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- Pengadaan barang dan jasa
- Rekapitulasi izin edar produk Obat dan Makanan
- Data obat palsu
- Sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan
- Penarikan Obat Ilegal
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewajiban Lembaga Internasional Non-Profit di Bidang Kesehatan
- Regulasi terkait pendaftaran
- Pengawasan pangan olahan kemasan ulang kiloan

Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:

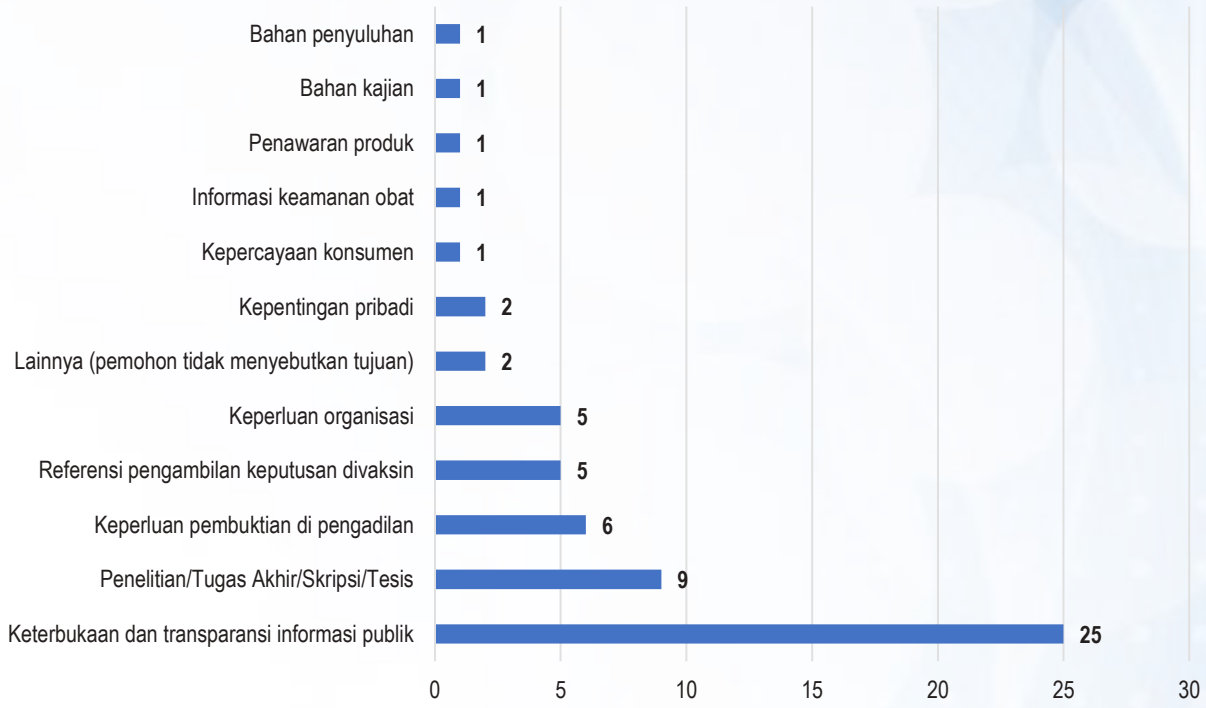

Grafik 3.3 Tujuan Permohonan Informasi Publik ke PPID Utama Tahun 2022

Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Selama tahun 2022, sebanyak 55 (lima puluh lima) permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 37 (67%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 13 (24%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 5 (9%) permintaan informasi yang ditolak, dengan alasan ada sebagian informasi yang termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan dan tidak dikuasai (dikuasai oleh instansi lain).

Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2022, PPID BPOM telah menerima 59 (lima puluh sembilan) permintaan informasi publik, namun 4 (empat) diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap. 55 (lima puluh lima) permintaan informasi yang dilayani memiliki rata-rata waktu penyelesaian pelayanan yaitu 9,29 hari kerja. Sebanyak 39 (71%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 hari kerja, 16 (29%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 11-17 hari kerja, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan selama lebih dari 17 hari kerja. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik (di bawah 17 hari kerja) mencapai 100%.

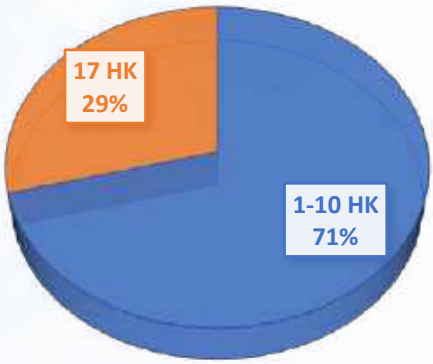

Grafik 3.4 Profil Pemenuhan SLA Layanan Informasi Publik PPID Utama Tahun 2022

C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM

Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja

Pada tahun 2022, tidak ada permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Unit Kerja di BPOM pusat karena layanan permintaan informasi yang masuk ditindaklanjuti oleh PPID Utama BPOM.

Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana UPT BPOM yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM, 13 (tiga belas) Balai POM, dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM di seluruh Indonesia telah menerima 59 (lima puluh sembilan) permintaan informasi. dengan rincian 50 (84,75%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 3 (5,08%) permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 6 (10,17%) permintaan informasi ditolak. Alasan permintaan informasi dikabulkan sebagian dan ditolak adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana BPOM tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.

Pemohon informasi terbanyak dari profesi pelajar/mahasiswa (81,36%), masyarakat umum (8,47%), dan karyawan (3,39)

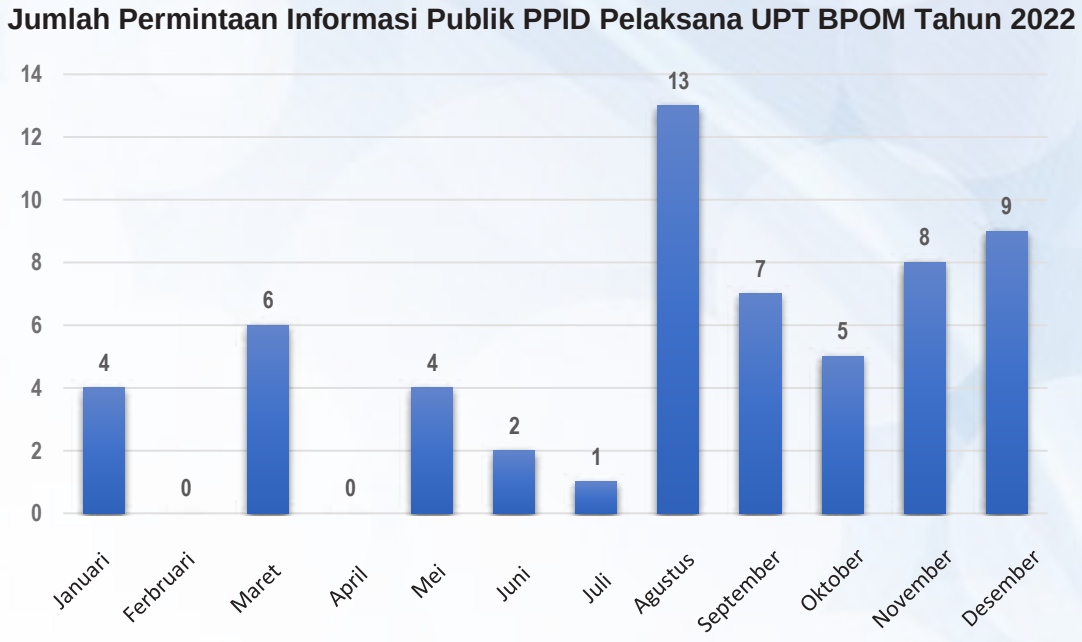

Grafik 3.5 Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT BPOM Tahun 2022

Data yang diminta antara lain terkait:

- Data organisasi, tugas, fungsi, dan hasil kinerja BPOM sebagai bahan penyusunan tugas akhir dan penelitian.
- Data produk Obat dan Makanan terdaftar di BPOM untuk keperluan riset/penelitian.
- Data produk Obat dan Makanan ilegal untuk keperluan riset/penelitian.
- Data penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan untuk keperluan riset/penelitian.
- Parameter pengujian Obat dan Makanan untuk keperluan riset/penelitian.

Rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi ke PPID Pelaksana UPT yaitu 5,72 hari kerja. Sebanyak 47 (80%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 hari kerja, 12 (20%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 11-17 hari kerja, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan selama lebih dari 17 hari kerja. Dengan demikian, pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) layanan permintaan informasi publik (di bawah 17 hari kerja) mencapai 100%.

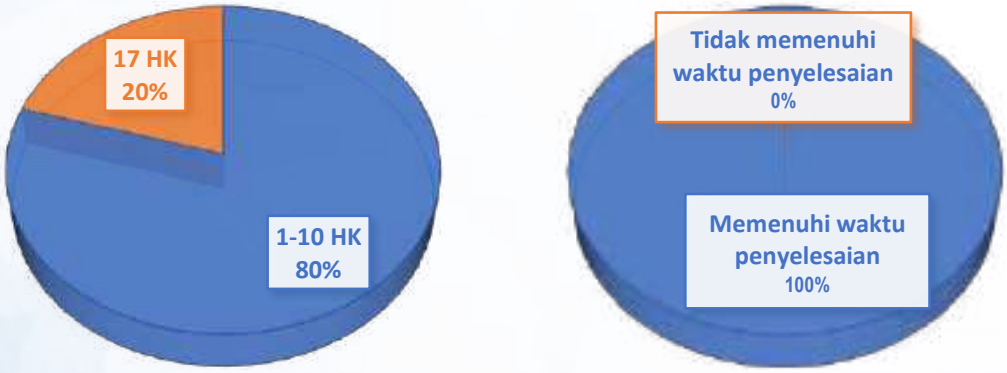

Grafik 3.6 Profil Pemenuhan SLA Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana UPT BPOM Tahun 2022

D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik

Pada tahun 2022 telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di *subsite* https://ppid.pom.go.id/, antara lain:

1. *Update* Informasi pada Menu Regulasi berupa Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik yaitu Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
2. *Update* Informasi pada Menu Regulasi berupa Rancangan Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik yaitu Rancangan Peraturan BPOM Tahun 2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

3. *Update* Informasi pada Menu Laporan berupa Ringkasan Laporan/Laporan Singkat PPID bulan Januari, Februari, Maret, Triwulan I, Bulan April, Mei, Juni, Triwulan II, Bulan Juli, Agustus, September, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.
4. *Update* Informasi pada Menu Laporan berupa Register Permintaan Informasi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.
5. *Update* Informasi pada Menu Laporan berupa Register Keberatan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2022.
6. *Update* Informasi pada Menu Laporan berupa Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021.
7. *Update* Informasi pada Menu Standar Layanan berupa SOP terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
8. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu DIPA Induk Tahun 2022.
9. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu DIPA Petikan Tahun 2022.
10. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.
11. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu Laporan Tahunan Tahun 2021.
12. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu Laporan Keuangan Tahun 2021.
13. *Update* Informasi pada Menu Informasi Publik berupa Informasi Publik Berkala yaitu *Report to The Nation* Triwulan I dan Triwulan II.
14. *Update* Informasi pada Menu Kalender Kegiatan.

Selama tahun 2022, telah dilakukan juga pemutakhiran informasi publik di media sosial *Twitter* dan *Instagram* PPID BPOM, antara lain:

1. Informasi mengenai Cek KLIK pada produk kosmetik pada 7 Januari 2022.
2. *Reels*: Informasi mengenai Cara Memilih Kosmetika Aman dengan BPOM *Mobile* pada 9 Januari 2022.

3. Informasi mengenai Vaksin COVID-19 Dosis *Booster* yang Disetujui BPOM per 10 Januari 2022 pada 10 Januari 2022.
4. Informasi mengenai EUA 5 Vaksin *Booster* pada 11 Januari 2022.
5. Informasi mengenai Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada 11 Januari 2022.
6. Bedah PerKI SLIP Nomor 1 Tahun 2021 bersama Komisi Informasi Pusat pada 12 Januari 2022.
7. Data Layanan Informasi Publik BPOM Tahun 2021 pada 12 Januari 2022.
8. Informasi mengenai Pelaksanaan Uji Klinik Vaksin Merah Putih yang Disetujui BPOM pada 7 Februari 2022.
9. Informasi tentang Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada 14 Februari 2022.
10. Informasi tentang Hubungan Komisi Informasi dengan PPID Badan Publik pada 10 Maret 2022.
11. Informasi mengenai Sebelas Vaksin COVID-19 yang memiliki EUA BPOM pada 10 Maret 2022.
12. Hak dan Kewajiban Badan Publik pada 11 Maret 2022.
13. Informasi mengenai EUA Obat COVID-19 di Indonesia pada 14 Maret 2022.
14. Kolaborasi Badan Publik Wujudkan Tata Kelola Informatif pada 18 Maret 2022.
15. Ketahui Peraturan Terbaru tentang Standar Layanan Informasi Publik pada 26 Maret 2022.
16. Pengumuman PPID BPOM Kembali Membuka Pelayanan Informasi Publik secara Tatap Muka mulai 4 April 2022 pada 3 April 2022.
17. Informasi mengenai Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik pada 13 April 2022.
18. Informasi mengenai Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 pada 14 April 2022.
19. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan BPOM Tahun 2022 pada 21 April 2022.
20. Informasi mengenai Data Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2022 pada 28 April 2022.
21. Pemutakhiran Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan BPOM Tahun 2022 pada 29 April 2022.
22. Kenali Istilah Perlindungan Data Pribadi dan Aksesibilitas Informasi bagi Penyandang Disabilitas dalam PerKI SLIP pada 11 Mei 2022.
23. Informasi mengenai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 pada 21 Mei 2022.
24. Informasi mengenai *E-Book* Farmakope Herbal Indonesia pada 30 Mei 2022.
25. Workshop Pemutakhiran DIP dan DIK di lingkungan BPOM Tahun 2022 pada 6 Juni 2022.
26. Kupas Istilah Baru dalam PerKI: Bantuan Kedinasan, Portal Satu Data pada 10 Juni 2022.
27. Informasi mengenai Struktur Kelembagaan PPID pada 16 Juni 2022.

28. Kegiatan PPID: Perkuat Kolaborasi BPOM Kunjungi Komisi Informasi Pusat pada 20 Juni 2022.
29. Informasi Mengenai Syarat yang Harus Diperhatikan dalam Pengajuan Permintaan Informasi pada 21 Juni 2022.
30. Alur Permintaan Informasi Publik berdasarkan PerKI No.1 Tahun 2021 pada 28 Juni 2022.
31. Formulir Permintaan Informasi Publik pada 30 Juni 2022.
32. Kegiatan PPID: Kolaborasi Dengan PPID Badan Publik, BPOM Susun *Tools* Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 8 Juli 2022.
33. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta pada 30 Juli 2022.
34. Ajakan untuk Mengenal PPID BPOM pada 24 Agustus 2022.
35. Kegiatan PPID: Sosialisasi *Monitoring* Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 24 Agustus 2022.
36. Data Layanan PPID Tahun 2022 TW 2 pada 1 September 2022.
37. Informasi Perubahan *Username* Media Sosial PPID pada 16 September 2022.
38. DIPA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada 16 September 2022.
39. Akses Informasi Tanpa Keterbatasan pada 25 September 2022.
40. *Greetings*: Selamat Memperingati Hari Hak untuk Tahu! pada 28 September 2022.
41. Informasi tentang Pengajuan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik pada 4 Oktober 2022.
42. Kegiatan PPID: Kolaborasi Kementerian Kominfo, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Keuangan, dan BPOM dalam Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada 2 November 2022.
43. Pionas, Informasi Lengkap tentang Obat pada 2 November 2022.
44. *Reels*: Perbedaan PPID dan HALOBPOM pada 20 November 2022.
45. Kegiatan PPID: BPOM Gelar Harmonisasi Standar Layanan Informasi Publik pada 22 November 2022.
46. Kegiatan PPID: Visitasi Komisi Informasi Pusat, Pastikan BPOM Terbuka pada 1 Desember 2022.
47. Ajakan untuk mengenal *Subsite* Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada 23 Desember 2022.

Selain melalui kanal *subsite* dan media sosial PPID Utama BPOM, dilakukan juga pengumuman dan pemutakhiran informasi publik di *subsite* dan media sosial Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan PPID Pelaksana BPOM.

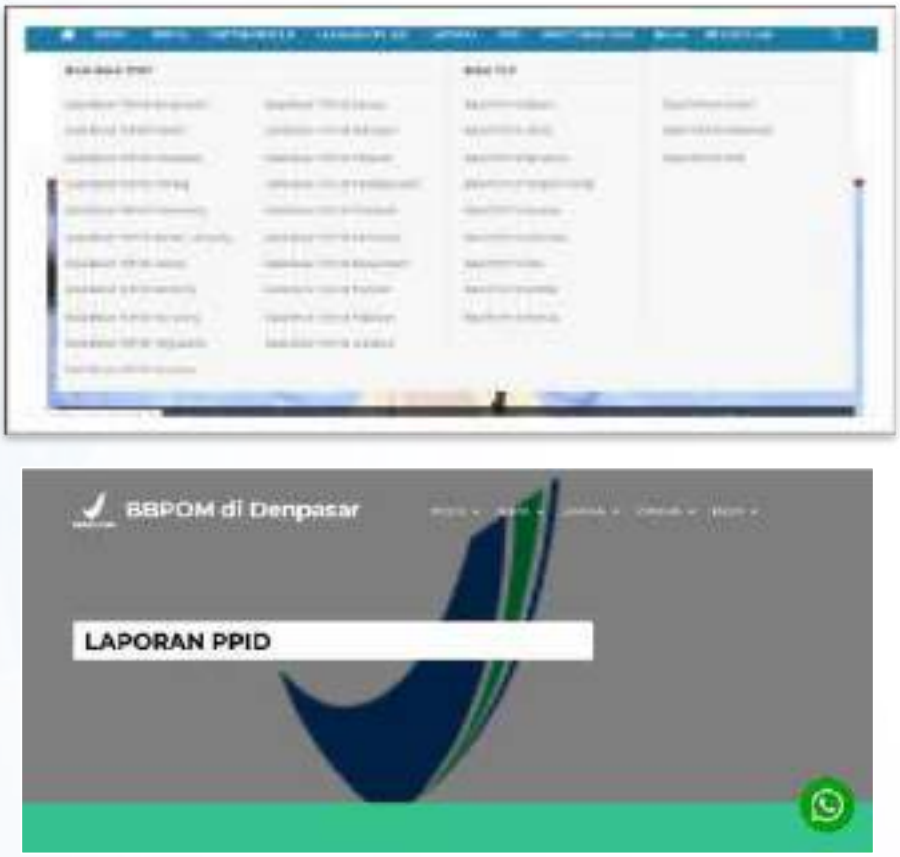

Gambar 3.1 *Subsite* Unit Pelaksana Teknis BPOM

Gambar 3.2 Contoh Pengumuman Informasi Publik pada Media Sosial Unit Pelaksana Teknis BPOM

BAB IV
KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2022

A. Kegiatan PPID BPOM

Sepanjang Tahun 2022, berbagai kegiatan dilakukan PPID BPOM sebagai upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut diantaranya:

- **11 Januari 2022**
  Diskusi: "Bedah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik"
  Kegiatan ini diselenggarakan untuk membedah (membahas) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang berkaitan dengan reviu penyusunan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Kegiatan yang dihadiri Agus Wijayanto Nugroho, Tenaga Ahli dari Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber ini menjadi wadah diskusi dan konsultasi bagi jajaran PPID BPOM dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan layanan informasi publik.

- **Januari-April 2022**
  Pembahasan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM
  Kegiatan rutin ini dilakukan oleh PPID Utama bersama PPID Pelaksana di seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM. Hal ini dilakukan untuk menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh PPID dalam melakukan layanan Informasi Publik.

- **14 Maret 2022**
  Kolaborasi dengan PPID Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) demi Wujudkan Tata Kelola Informatif
  PPID BPOM menerima kunjungan PPID BNPT dengan agenda Konsultasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Kolaborasi antara PPID BPOM dan PPID BNPT ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

- **29 April 2022**
  Pemutakhiran Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM
  Selain Daftar Informasi Publik, PPID BPOM juga melakukan pemutakhiran Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan BPOM. Setiap PPID Pelaksana di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis memberikan kontribusi terhadap penyusunan salah satu pedoman pengelolaan layanan informasi publik ini.

- **6 Juni 2022**
  ***Workshop* Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022**

Kegiatan ini merupakan pembahasan lanjutan dari penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan hasil usulan dari Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. PPID BPOM mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro sebagai narasumber pada *workshop* ini.

- **15 Juni 2022**
  Kunjungan PPID BPOM ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
  Dalam rangka audiensi dan silaturahmi dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat terpilih periode 2022-2026, PPID BPOM mengunjungi kantor KI Pusat yang berlokasi di Wisma BSG, Jakarta Pusat.

- **8 Juli 2022**
  Kolaborasi Penyusunan *Tools* Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dengan PPID Kementerian Pertanian dan PPID Kementerian Keuangan
  Dalam rangka meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik, PPID BPOM melakukan penyusunan rencana *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM. Sebagai langkah awal, PPID BPOM melakukan kolaborasi dengan PPID Kementerian Pertanian dan PPID Kementerian Keuangan untuk menyusun *tools* yang akan digunakan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM.

- **8 Oktober 2022**
  Kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Keuangan dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
  PPID BPOM menjadi salah satu narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Keuangan.

- **6 Oktober 2022**
  Pendampingan PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
  Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan layanan Informasi Publik, PPID Utama melakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

- **22 November 2022**
  Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Standar Layanan Informasi Publik
  Kegiatan ini merupakan tahap finalisasi dari rangkaian penyusunan Peraturan BPOM tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan ini diperlukan sebagai panduan bagi BPOM dalam menyelenggarakan layanan informasi publik secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **14 Desember 2022**
  Studi Tiru ke PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pendampingan PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
  Sebagai salah satu upaya untuk terus melakukan pembenahan internal untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, PPID BPOM melakukan studi tiru ke PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, PPID Utama BPOM juga mendatangi PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang untuk melakukan pendampingan terkait pengelolaan layanan informasi publik.

B. Capaian PPID BPOM

Pada tahun 2022, terdapat capaian yang berhasil diraih dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PPID BPOM diantaranya:

1. **Keikutsertaaan BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat**. Penilaian yang dilakukan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
   1) Pengisian *Self-Assesment*, melalui melalui https://e-monev.komisiinformasi.go.id/ pada 17 Oktober 2022.
   2) Presentasi Uji Publik, yang dilaksanakan di Hotel Redtop Jakarta pada Senin, 31 Oktober 2022. Sekretaris Utama menyampaikan presentasi tentang urgensi keterbukaan Informasi Publik dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di hadapan tim penilai dari Komisioner Komisi Informasi Pusat dan akademisi/praktisi.

3) Tahapan selanjutnya, Komisioner Komisi Informasi Pusat didampingi oleh Tenaga Ahli mendatangi kantor BPOM dalam rangka visitasi dan verifikasi hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada 30 November 2022. Selain melakukan verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang ada di BPOM, Komisioner KI Pusat juga berkesempatan meninjau BPOM *Operational Center*, *Contact Center* HALOBPOM dan ruang layanan PPID BPOM.

4) Pada tahap akhir, BPOM kembali berhasil meraih Predikat Badan Publik Informatif dan berada di peringkat ke-4 pada kategori LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) dengan nilai 98,88. Nilai ini meningkat sebesar 3,45 poin dari sebelumnya 95,43 pada tahun 2021.

2. **Penerbitan Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan layanan Informasi Publik** diantaranya:
   1) Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM;
   2) Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM;
   3) Peraturan BPOM No 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Ekternal

Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID BPOM masih menemukan beberapa kendala diantaranya:

1. Pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik belum memahami kelengkapan persyaratan permintaan informasi seperti melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perseorangan dan akte pendirian badan hukum untuk pemohon Badan Hukum. Pengajuan permintaan informasi tidak dapat ditindaklanjuti jika kelengkapan persyaratan tersebut tidak lengkap.
2. Pemohon tidak mencantumkan tujuan penggunaan informasi yang diajukan kepada PPID BPOM sehingga permintaan harus dikonfirmasi kembali kepada pemohon untuk mendapatkan tujuan penggunaan informasi secara jelas.
3. Masih belum tersosialisasikannya jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

B. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala internal yang dihadapi oleh PPID di lingkungan BPOM antara lain:

1. Kurangnya pemahaman petugas layanan informasi Balai Besar/Balai POM terhadap pengelolaan layanan informasi publik PPID. Petugas belum dapat membedakan layanan PPID dan Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Masih terdapat layanan permintaan informasi publik yang merupakan layanan PPID, namun dilayani oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen.
2. Kurang optimalnya sosialisasi terkait pengelolaan layanan informasi publik yang diikuti oleh petugas layanan informasi di lingkungan internal BPOM, sehingga belum semua petugas memahami tugas dan fungsi PPID.
3. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat PPID di lingkungan BPOM, baik itu PPID Pelaksana di unit kerja Utama maupun PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di daerah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

BAB VI
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2022, maka untuk mempertahankan capaian tahun 2022 dan meningkatkan nilai *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2023, BPOM perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

A. Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

1. Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM yang disesuaikan dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM secara berkala setiap tahun.
3. Reviu dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro, yaitu:
   1) Standar Pengumuman;
   2) Standar Permintaan Informasi Publik;
   3) Standar Pengajuan Keberatan;
   4) Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
   5) Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
   6) Standar Maklumat Pelayanan; dan
   7) Standar Pengujian Konsekuensi
4. Penguatan kebijakan dan regulasi di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT BPOM melalui penyiapan *template* Keputusan Kepala Unit Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai POM tentang Organisasi PPID Pelaksana di Lingkungan Unit Kerja/UPT dan SOP Mikro terkait pengelolaan informasi publik yang siap diadopsi oleh PPID Pelaksana.

B. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT
2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi PPID melalui forum konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, diseminasi, seminar, *benchmarking best practice* ke badan publik lainnya terkait pengelolaan pelayanan informasi publik.

C. Penguatan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM

Dalam pelaksanaan monev internal ini, diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM. Oleh karena itu, perlu dilakukan *launching*

pelaksanaan monev internal keterbukaan informasi publik oleh Kepala BPOM dihadiri oleh seluruh PPID di lingkungan BPOM dan menghadirkan Komisi Informasi Pusat serta Badan Publik terkait, yang berisi kegiatan berikut:

1. Penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik.
2. *Launching* penguatan keterbukaan informasi publik meliputi:
   1) Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM;
   2) *Subsite* ppid.pom.go.id terpadu dan aplikasi PPID BPOM mobile terpadu; dan
   3) *Subsite* unit kerja dan UPT.
3. Pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik dan aplikasi e-monev keterbukaan informasi publik BPOM (evortala.pom.go.id).

D. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

1. Pengembangan e-Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM) PPID di *subsite* https://ppid.pom.go.id/.
2. Pengembangan aplikasi e-Monev internal Keterbukaan Informasi Publik yang terhubung dengan *subsite* ppid.pom.go.id dan *dashboard* BPOM *Operational Center* (BOC) untuk mempermudah proses *monitoring* dan evaluasi internal.
3. Pengelolaan *subsite* PPID BPOM Terpadu (*Integrated Access for* PPID), yaitu megintegrasikan *subsite* PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis dengan PPID BPOM.
4. Pengelolaan PPID BPOM *Mobile* Terpadu (*One Service App for* PPID), yaitu mengintegrasikan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis dengan PPID BPOM.
5. Pemanfaatan *sharing folder* dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan *updating* informasi publik.

E. Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

F. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik BPOM melalui berbagai media.

G. Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, serta peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2022

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1	*Workshop* Penulisan Karya Tulis Populer	*Zoom Meeting*	10 Januari 2022	PPSDM POM
2	*Certified Contact Center Team Leader* (CCTL)	Hotel Sahira Butik Pakuan - Bogor	11-12 Januari 2022	Telexindo
3	Sosialisasi PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi CPKB dan Sosialisasi Keputusan Ka BPOM No. HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetik yang Dikemas oleh Beberapa Industri Kosmetik di Wilayah Indonesia Selama Pandemi Covid-19	*Zoom Meeting*	25 Januari 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM
4	*Certified Contact Center Quality Assurance Training*	Hotel Sahira Butik Pakuan - Bogor	25 - 26 Januari 2022	Telexindo
5	Sosialisasi Penyusunan Kerangka Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Bogor	2-4 Februari 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
6	Tips Cerdas Menulis Karya Tulis Ilmiah	Aplikasi IDEAS	9 Februari 2022	PPSDM POM
7	Teknik dan Strategi Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama	Daring	9 Februari 2022	PPSDM POM
8	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja	*Zoom Meeting*	4 Februari 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan
9	KIE Keamanan dan Manfaat Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	*Zoom Meeting*	21 Februari 2022	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM
10	*Graphic Design* 101	Daring	23 Februari 2022	PPSDM POM
11	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian Tingkat Medium di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	*Zoom meeting*	22-25 Februari 2022	Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM
12	*Training of Trainer* Workshop Informasi dan Komunikasi	Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat	1, 2 dan 4 Maret 2022	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM
13	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika dan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	*Zoom Meeting*	1 Maret 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
				Kosmetika BPOM
14	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Kepegawaian (SRIKANDI) Versi 2	*Zoom Meeting*	7 Maret 2022	Biro SDM
15	Advokasi dan Sosialisasi Peraturan di Bidang Pangan Olahan	Daring	15 - 17 Maret 2022	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM
16	Webinar Registrasi Pangan Olahan "Registrasi Pangan Olahan dan Kemudahan Perizinan Berusaha, Registrasi Semakin Murah"	*Zoom Meeting*	25 Maret 2022	Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM
17	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar	Aplikasi IDEAS	2022	PPSDM POM
18	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan	Aplikasi IDEAS	2022	PPSDM POM
19	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Dasar	*Zoom Meeting*	2022	PPSDM POM - BRIN
20	Pelatihan *Supervisory Development Programme*	Aplikasi IDEAS, *Zoom Meeting*	4-21 April 2022	PPSDM POM
21	Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli Angkatan II Tahun 2022	*Zoom Meeting*	4 April 2022 - 28 Juni 2022	PPSDM POM
22	Integrated Webinar Series Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat dengan tema "Bersinergi Mengoptimalkan Peran Masyarakat Memberantas Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat"	*Zoom Meeting*	5 April 2022	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM
23	Sosialisasi Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan dan Pengawasan Vitamin D di atas 1000 IU sampai 4000 IU sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus	*Zoom Meeting*	7 April 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
24	Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	*Zoom Meeting*	8 April 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
25	Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI	*Zoom Meeting*	22 April 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
26	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 45001:2018	*Zoom Meeting*	26 April 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
27	*Training of Trainer* Pelatihan Teknis PFM	Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat	11-12 April, 23 Mei 2022	PPSDM POM
28	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama	Daring	2022	PPSDM POM

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
29	Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima	The Margo Hotel Depok	12-13 Mei 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
30	Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat BPOM	Jakarta	17-18 Mei 2022	Biro Sumber Daya Manusia BPOM
31	Sosialisasi Disiplin Pegawai PP 94 Tahun 2021	*Zoom Meeting*	10 Juni 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
32	Sosialisasi Pengajuan PPUK Obat Melalui Sistem Aplikasi Pra Klinik - Uji Klinik (SIAP-UK)	*Zoom Meeting*	10 Juni 2022	Direktorat Registrasi Obat BPOM
33	Webinar Dalam Rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)	*Zoom Meeting*	14 Juni 2022	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM
34	Sosialisai Kebijakan Importasi Pangan Olahan Asal Jepang/ Forum Komunikasi Pengawasan Pangan Olahan Kebijakan Impor Asal Jepang	*Zoom Meeting*	14 June 2022	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM
35	Sosialisasi Updating Peraturan UU No.13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	*Zoom Meeting*	24 Juni 2022	PPSDM POM
36	*Sharing Knowledge* Sesi I, Topik: Sukses Mengurus Izin Edar di BPOM	*Zoom Meeting*	1 Juli 2022	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM
37	Web Seminar Registrasi Pangan Olahan dengan tema "Sosialisasi Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko"	*Zoom Meeting*	6 Juli 2022	Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM
38	Sosialisasi dan Internalisasi *Employee Branding* dan *Core Value* BerAKHLAK Tingkat Dasar	Aplikasi IDEAS	8 Juli 2022	PPSDM POM
39	Sosialisasi Regulasi di Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	*Zoom Meeting*	15 July 2022	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
40	"Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik" dengan tema Peranan Pengawasan Kosmetik Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional	Daring	19 - 20 Juli 2022	Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM
41	*Sharing Session* "Sosialisasi PerBPOM No.6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPOM"	*Zoom Meeting*	22 Juli 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
42	Pelathan Teknis Penyusunan Standar dan Kajian di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kesulitan II	BPOM	27 Juni - 18 Agustus 2022	PPSDM POM
43	Webinar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 "Kolaborasi Atas Stunting Melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045"	*Zoom Meeting*	4 Agustus 2022	Kementerian Keuangan
44	Bimbingan Teknis Nasional Implementasi Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko	Zoom	11 Agustus 2022	Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM
45	Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (*Basic)*	Hotel Arya Duta, Jakarta	18 Agustus 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM
46	Sosialisasi Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label	*Zoom Meeting*	25 Agustus 2022	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM
47	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian Tingkat Dasar di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	*Zoom Meeting*	12-15 September 2022	Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM
48	Sosialisasi Peraturan Badan POM No.11 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi Dan Kepka Badan POM Tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi	*Zoom Meeting*	14 September 2022	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
49	Best Practice Sharing "Pemenuhan Pelayanan Publik Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Sensorik"	*Zoom Meeting*	16 September 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
50	Sosialisasi PerBPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Dalam Rangka Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	*Zoom Meeting*	21 September 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika BPOM
51	*Webinar Series*: *Tagline*, Strategi Promosi yang Kreatif, Representatif, dan Efektif Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	*Zoom Meeting*	26 September 2022	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
52	Pemberian Umpan Balik yang Efektif dalam Optimalisasi Kinerja	*Zoom Meeting*	27 September 2022	Biro Sumber Daya Manusia
53	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Aplikasi LAPOR dan SIMPEL Ver.2022 bagi Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM	Hotel Santika, Bekasi	28 September 2022	Biro Hukum dan Organisasi BPOM
54	BImbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pubik bagi PPID Kementerian/Lembaga antar Pemerintah Daerah	*Zoom Meeting*	4 Oktober 2022	Kementerian Komunikasi dan Informatika
55	Sosialisasi Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2022 tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi di Wilayah Indonesia	Daring	7 Oktober 2022	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM
56	Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di unit kerja dan kedeputian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Daring	6 Oktober 2022	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM
57	*Cosmetic Intensive* Webinar: *Boosting* Pasar Kosmetikmu Melalui Penandaan dan Iklan yang Baik	Daring	13 Oktober 2022	Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM
58	Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi dan Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi	Zoom	13 Oktober 2022	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM
59	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemantauan, KIE, dan Pengujian	Daring	14 Oktober 2022	PPSDM POM
60	*In House Training Effective Infographics Design*	Zoom Meeting	17-19 Oktober 2022	PPSDM POM
61	*Best Practice* Implementasi SAKIP dan *Entry Meeting* Evaluasi SAKIP TA 2022	*Zoom meeting*	18-19 Oktober 2022	Inspektorat Utama BPOM
62	Advokasi dan Sosialisasi Peraturan di Bidang Pangan Olahan	Daring	18 Oktober 2022	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM
63	Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I	Zoom Meeting dan SIPANDAI	20-28 Oktober 2022	PPSDM POM
64	Sosialisasi Regulasi Keamanan dan Mutu Pangan Olahan	Daring	25 Oktober 2022	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan BPOM
65	Kelas/Seminar Daring (Online) Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar "Analisis Efisiensi Relatif di Unit Pelaksana Teknis BPOM"	*Zoom meeting*	26 October 2022	PPSDM POM

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek / Pelatihan / Diseminasi/Sosialisasi/ Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
66	"*Self Awareness*" Mengenal Diri dan Mengelola Potensi Diri dalam Optimalisasi Kinerja	*Zoom Meeting*	10 November 2022	Biro Sumber Daya Manusia BPOM
67	Webinar "Manajemen dan Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan"	Daring	15 November 2022	PPSDM POM dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)
68	*High Perfomance* melalui Kecerdasan Emosi dan Harmonisasi Peran dalam Karier dan Keluarga	*Zoom Meeting*	22 November 2022	PPSDM POM
69	Workshop Inovasi Pelayanan Publik BPOM	Hotel Savero Depok	5 Desember 2022	PPSDM POM
70	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli dan Terampil - Modul Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi	Aplikasi IDEAS	2022	PPSDM POM
71	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli dan Terampil - Modul Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Aplikasi IDEAS	2022	PPSDM POM
72	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli dan Terampil - Modul Administrasi Jabatan Fungsional	Aplikasi IDEAS	2022	PPSDM POM
73	Pelatihan Bahasa Isyarat Tingkat Dasar	*Zoom Meeting* dan *Google Classroom*	12-23 Desember 2022	PPSDM POM
74	Dasar-Dasar Pengujian Obat dan Makanan (Good Laboratory Practice)	PPSDM - IDEAS	16 Desember 2022	PPSDM POM
75	Dasar-Dasar Penilaian Obat dan Makanan	PPSDM - IDEAS	23 Desember 2022	PPSDM POM

LAMPIRAN 2

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Telp./Fax. 021-4263333
Email: ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID DI LINGKUNGAN BPOM
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2022

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum	Tidak Dikuasai
Januari 2022	7	3,875	Hari Kerja	5	1	1	2	0	0
Februari 2022	3	3,33	Hari Kerja	3	0	0	0	0	0
Maret 2022	25	9,26	Hari Kerja	19	5	1	3	0	3
Triwulan I (Januari - Maret) 2022	**35**	**5,49**	**Hari Kerja**	**27**	**6**	**2**	**5**	**0**	**3**
April 2022	9	12,00	Hari Kerja	3	4	2	6	0	0
Mei 2022	5	12,37	Hari Kerja	3	0	2	2	0	0
Juni 2022	5	3,58	Hari Kerja	3	0	2	0	0	2
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2022	**54**	**7,40**	**Hari Kerja**	**36**	**10**	**8**	**13**	**0**	
Juli 2022	3	4,00	Hari Kerja	3	0	0	0	0	0
Agustus 2022	17	6,51	Hari Kerja	13	2	2	2	0	2
September 2022	9	6,89	Hari Kerja	8	0	1	1	0	0
s/d Triwulan III (Januari - September) 2022	**83**	**6,87**	**Hari Kerja**	**60**	**12**	**11**	**16**	**0**	**2**
Oktober 2022	9	7,1	Hari Kerja	7	2	0	2	0	0
November 2022	12	6,6	Hari Kerja	10	2	0	2	0	0
Desember 2022	10	14,40	Hari Kerja	10	0	0	0	0	0
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2022	**114**	**7,49**	**Hari Kerja**	**87**	**16**	**11**	**20**	**0**	**2**

Catatan:
Dari 118 permintaan informasi, 4 diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap

LAMPIRAN 3

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Email : ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID UTAMA BPOM
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2022

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Januari 2022	3	4	Hari Kerja	2	1	0	1	0	0
Februari 2022	3	3,33	Hari Kerja	3	0	0	0	0	0
Maret 2022	19	10,37	Hari Kerja	15	4	0	2	0	2
Triwulan I (Januari - Maret) 2022	**25**	**8,76**	**Hari Kerja**	**20**	**5**	**0**	**3**	**0**	**2**
April 2022	9	12	Hari Kerja	3	4	2	6	0	0
Mei 2022	1	17	Hari Kerja	0	0	1	1	0	0
Juni 2022	3	3,67	Hari Kerja	1	0	2	0	0	2
Triwulan II (Januari-Juni) 2022	**38**	**9,34**	**Hari Kerja**	**24**	**9**	**5**	**10**	**0**	**4**
Juli 2022	2	5	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Agustus 2022	4	9,5	Hari Kerja	2	2	0	0	0	2
September 2022	2	10,5	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
s/d Triwulan III (Januari-September) 2022	**46**	**9,21**	**Hari Kerja**	**30**	**11**	**5**	**10**	**0**	**6**
Oktober 2022	4	7	Hari Kerja	3	1	0	1	0	0
November 2022	4	10,5	Hari Kerja	3	1	0	1	0	0
Desember 2022	1	17,0	Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
s/d Triwulan IV (Januari-Desember) 2022	**55**	**9,29**	**Hari Kerja**	**37**	**13**	**5**	**12**	**0**	**6**

Catatan:
Dari 59 permintaan informasi, 4 diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap

LAMPIRAN 4

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Telp./Fax. 021-4263333
Email: ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA BPOM
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2022

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum	Tidak Dikuasai
Januari 2022	4	3,75	Hari Kerja	3	0	1	1	0	0
Februari 2022	0	0,00	Hari Kerja	0	0	0	0	0	0
Maret 2022	6	8,16	Hari Kerja	4	1	1	2	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2022	**10**	**3,97**	**Hari Kerja**	**7**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**
April 2022	0	0,00	Hari Kerja	0	0	0	0	0	0
Mei 2022	4	7,75	Hari Kerja	3	0	1	1	0	0
Juni 2022	2	3,50	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
s/d Triwulan II (Januari - Juni) 2022	**16**	**3,86**	**Hari Kerja**	**12**	**1**	**3**	**4**	**0**	**0**
Juli 2022	1	3,00	Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
Agustus 2022	13	3,53	Hari Kerja	11	0	2	2	0	0
September 2022	7	3,28	Hari Kerja	6	0	1	1	0	0
s/d Triwulan III (Januari - September) 2022	**37**	**3,66**	**Hari Kerja**	**30**	**1**	**6**	**7**	**0**	**0**
Oktober 2022	5	7,2	Hari Kerja	4	1	0	1	0	0
November 2022	8	2,75	Hari Kerja	7	1	0	1	0	0
Desember 2022	9	11,77	Hari Kerja	9	0	0	0	0	0
s/d Triwulan IV (Januari - Desember) 2022	**59**	**4,56**	**Hari Kerja**	**50**	**3**	**6**	**9**	**0**	**0**

BADAN POM

@ppidbpom

www.ppid.pom.go.id

@ppid.bpom

ppid@pom.go.id

PPID BPOM *Mobile*